BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi saat ini yang terjadi dalam perkembangan laporan pertanggung jawaban sektor publik di Indonesia mengalami tuntutan yang cukup tinggi, salah satunya adalah transparansi (keterbukaan laporan) atas pemangku kepentingan. Sebagai penanggung jawab atas terwujudnya transparansi financial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab atas keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan. Informasi keuangan yang diberikan haruslah memiliki nilai manfaat bagi para pengguna, atau para pemangku kepentingan (Kartika dan Amalia, 2018).

Menurut Aditya dan Surjono (2017), perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah pelimpahan tanggung jawab penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, dan untuk memberikan kemandirian bagi pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya yang dimiliki (Faishol 2016).

Menurut Christia dan Ispriyarso (2019) pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari

alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat sehingga menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana dengan membuat laporan keuangan.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan juga menyatakan bahwa unsur-unsur dan kriteria untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas ialah terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sebuah laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut memberikan nilai informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya dalam hal pengambilan keputusan. Menurut Ihsanti (2014) kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Dalam perkembangannya, baik tidaknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, dua diantaranya adalah sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem

Pengendalian Interen (SPI). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menjelaskan bahwa, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Wiranto (2020) pengendalian intern akuntansi adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Darwis dan Meliana (2020) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi memberikan keyakinan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. Tingginya kualitas sebuah laporan keuangan sangat dipengaruhi dengan adanya sistem pengendalian internal. Baiknya sebuah sistem pengendalian internal akan menciptakan kinerja pemerintah menjadi lebih

ideal, sehingga dapat dengan mudah untuk mencapai tujuan dari organisasi (Karsana dan Suryana 2017).

Penelitian terkait pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pernah dilakukan sebelumnya oleh Aditya dan Surjono (2017), Herawati (2016), Darwis dan Meliana (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Tullah dkk (2018), Novitasari (2019), Karmila dkk (2014) namun menemukan hasil yang berbeda dimana sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah laporan keuangan yakni kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut PP No 1 Tahun 2017 pasal 2 ayat 6 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Dari pengertian di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjalankan suatu tanggung jawab sesuai dengan kemampuan atau ketrampilan.

Ihsanti (2014) berpendapat kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcome*).

Menurut Kalumata dkk (2016), perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akrual bukan sekedar masalah teknis pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan, tetapi dibutuhkan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*) serta mendisaian atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Oleh karenanya, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki kompetensi agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD yang berkualitas.

Memiliki SDM yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi sangatlah menunjang keterandalan sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang jauh dari kata menyesatkan, harus sering memberikan bimbingan dan pelatihan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk mengaplikasikan sistem akuntansi yang ada. Kegagalan aparatur atau staf pemerintahan daerah dibidang keuangan dalam mengenal dan mengimplementasikan standar-standar akuntansi yang berlaku dapat mengakibatkan kesalahan saat penyajian laporan keuangan yang dibuat, dan tidak sesuai dengan strandar laporan keuangan yang telah ditetapkan pemerintah (Sambuaga dkk 2020).

Sama halnya dengan penelitian terkait pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian terkait pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Zubaidi dkk (2019), Sudiarti dan Juliarsa (2020), dan Ihsanti (2014) yang menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, penelitian terkait juga

telah dilakukan sebelumnya oleh Siwambudi dkk (2017),Karmila dkk (2014),Kalumata dkk (2016), Wijayanti dan Handayani (2017) namun menemukan hasil yang berbeda, dimana kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Adanya sebuah sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM yang baik di lingkungan pemerintah Kota Ternate, diharapkan dapat tercapai tujuan dari pemerintah untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dalam perkembangannya kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Ternate mengalami kemajuan yang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provisi Maluku Utara. Hasil tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Perkembangan opini LKPD Kota Ternate tahun 2016-2020

No	Tahun	Opini
1	2016	WTP
2	2017	WTP
3	2018	WTP
4	2019	WTP
5	2020	WTP

Sumber: BPK RI perwakilan Provinsi Maluku Utara

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pemerintah Kota Ternate selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Provinsi Maluku Utara. Meskipun demikian masih di temukan beberapa kelemahan dalam hasil pemeriksaan tahun anggaran 2020, hal tersebut diutarakan langsung oleh Wali kota Ternate Tauhid Soleman. Beliau mengutarakan bahwa, meskipun laporan keuangan pemerintah Kota Ternate tahun 2020 memperoleh opini WTP, namun dari hasil pemeriksaan oleh BPK masih ditemukan beberap kelemahan, baik ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

maupun kelemahan sistem intern. Kelemahan dan kekurangan yang di temukan ini akan diperbiki dan ditindaklanjuti. (Kumparan.com, 2021)

Sebagaimana fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada OPD Kota Ternate)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate?
2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya terkait pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dapat menambah wawasan terkait peran moderasi dari moralitas individu dalam memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah daerah pada umumnya dan Kota Ternate secara khusus dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberikan bukti empiris terkait pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.